



Research Article

Idealitas Peran Kiai Dalam Konstelasi Politik Praktis

Nani Widiawati

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; nani.widiawati@uinsgd.ac.id 



Copyright © 2024 by Authors, Published by HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 16, 2024

Revised : February 20, 2024

Accepted : March 02, 2024

Available online : March 17, 2024

How to Cite : Nani Widiawati. (2024). The Ideality of the Kiai's Role in Practical Political Constellations. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 3(1), 70-81. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i1.106>

The Ideality of the Kiai's Role in Practical Political Constellations

Abstract. This research aims to find a philosophical basis for the ideal position of kiai in practical political constellations. This study is a qualitative research with a literature study design and descriptive method focusing on finding the ideal concept of kiai in politics based on its reality dimensions. The research results show that kiai and politics in Islam are two things that are synergistic, kiai is a prototypical representation of the Prophet's heirs who appear as an active agent of social change, and the kiai's ideality in politics ultimately returns to the kiai's own consistency. In politics which is filled with intrigue and conflict, political leaders must be able to minimize conflict and act as problem solvers. If not, then religious positions can become instruments of power. Kiai must be able to realize his sociological role as agent of change consistently because politics is not just a tool of power but the science of how to build universal benefit.

Keywords: kiai, politics, kiai politicians

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan filosofis bagi posisi ideal kiai dalam konstelasi politik praktis. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi pustaka dan metode deskriptif dengan memfokuskan pada temuan konsep ideal kiai dalam politik berdasarkan dimensi realitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiai dan politik dalam Islam adalah dua hal yang bersinergis, kiai merupakan representasi prototype pewaris Nabi yang tampil sebagai pelaku aktif perubahan sosial, dan idealitas kiai dalam berpolitik, pada akhirnya dikembalikan pada konsistensi kiai sendiri. Dalam politik yang syarat dengan intrik dan konflik, kiai politisi harus mampu meminimalisir konflik dan berperan sebagai pemecah masalah. Jika tidak, maka kedudukan agama dapat menjadi instrumen kekuasaan. Kiai harus mampu merealisasikan peran sosiologisnya sebagai pelaku perubahan secara konsisten sebab politik bukan sekedar alat kekuasaan tetapi ilmu tentang bagaimana membangun kemaslahatan universal.

Kata Kunci: kiai, politik, kiai politisi

PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, kiai mewakili institusi yang cukup sensitif, yaitu agama. Sensitivitas persoalan agama di negeri ini dapat membawa kasus yang terkait dengan isu agama ke wilayah hukum apabila rasa keagamaan pemeluknya terlukai (Al Ghany et al., 2022; Mulya Mantri, 2022). Terlebih, sejarah menunjukkan dinamika hubungan agama dengan politik tidak selamanya mulus. Islam yang merealisasi pada refleksi politik seringkali dicurigai sebagai penentang ideologi negara.

Bakhtiar Effendy (Effendy, 2011) menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan politik, Islam telah mengalami jalan buntu. Pada era orde lama dan orde baru, negara melihat partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan pesaing yang berpotensi meruntuhkan keutuhan negara kesatuan Indonesia yang nasionalis sehingga lebih dari empat dekade. Kedua pemerintahan tersebut berupaya melemahkan dan menjinakkan parta-partai Islam sampai Islam politik dapat benar-benar dikalahkan. Sebaliknya, umat Islam yang aktif dalam politik memandang negara dengan penuh curiga atas sikap pemerintah dan menganggap bahwa negara tengah melakukan manuver politik untuk merontokkan signifikansi politik Islam dengan mendukung gagasan negara sekular. Sampai saat ini, dinamika hubungan antara agama dengan negara mengalami pasang surut terutama jika dikaitkan dengan perbedaan ideologi umat Islam yang mempengaruhi perbedaan dalam memahami ajaran Islam terkait dengan kehidupan politik, ditambah sifat teks Islam sendiri yang multitafsir.

Dalam sejarah politik Islam, seorang khalifah biasa menempatkan ulama sebagai penasehat khalifah. Ulama yang masuk ke dalam pusaran politik, antara lain al-Ghazali dan Abu Yusuf Syaibani. Potret ini juga ditemukan dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia, khususnya islamisasi yang menginspirasi kelahiran negara-negara Islam di Indonesia, telah melibatkan ulama dalam struktur formalnya. Di Samudera Pasai pada abad ke-13, hubungan erat kiai-raja telah terjalin. Ibnu Battutah melaporkan bahwa Raja Samudera Pasai, yaitu Sultan Malik al-Zahir, antusias dalam belajar agama pada para kiai. Kiai dan elite kerajaan biasa diskusi tentang Islam. Pada awal abad ke-15 di kerajaan Malaka, kiai memiliki posisi terhormat sebagai penasehat

raja. Disebutkan pula bahwa dalam proses islamisasi, Islam menjadi bagian hakiki dalam pembentukan kerajaan Islam. kiai memegang berbagai jabatan penting dalam kerajaan Islam (Fadhilah, 2011). Kerajaan Islam Demak di Jawa pada pada akhir abad ke-15, pendiriannya melibatkan perjuangan para kiai. Informasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam konstelasi politik telah berlangsung lama.

Di kerajaan Perlak, sultan pertamanya adalah Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah. Sebagaimana diketahui, di Indonesia terdapat banyak kerajaan Islam, seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kesultanan Cirebon, kesultanan Banten, kerajaan Gowa-Tallo, kerajaan Tertate dan Tidore, dan kerajaan Pajang. Dari keseluruhan kerajaan tersebut, kiai menempati posisi penting, antara lain sebagai penasihat raja atau sultan dan bahkan menjadi raja atau sultan sendiri. Di nusantara, beberapa kiai menjadi panglima seperti Syekh Yusuf di Banten, Abdussomad Palimbani di Patani, atau Kiai Mojo dalam perang Diponegoro. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila proses islamisasi di Indonesia, salah satu di antaranya melalui saluran politik (Wahidin & Arisman, 2021).

Di Indonesia, masuknya kiai ke dalam pusaran politik menjadi perbincangan polemis yang serius, menuai kontroversi yang sulit didamaikan, bahkan menjadi isu yang dikaitkan dengan politik kepentingan. Dalam konteks dinamika hubungan agama dengan politik yang terkesan saling mencurigai, kehadiran kiai dalam struktur formal politik semakin memperkuat wacana polemik tersebut. Kiai dan politik seringkali dipandang memiliki wilayah yang berbeda. Namun demikian, sebenarnya perbedaan tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan apabila keduanya dipersatukan dalam sebuah kerangka hubungan yang harmonis.

Tema tentang kiai dan politik sudah banyak diteliti para periset. Terdapat penelitian tentang keragaman sikap politik Kiai dan latar belakang keterlibatannya dalam politik (Sadi, 2016). Mengikuti pendapat ini, penulis mengkategorikan penelitian tentang keterlibatan kiai dalam politik pada tiga. *Pertama*, penelitian yang menemukan bahwa kiai tidak terlibat secara langsung dalam struktur politik, tetapi aktif mengawal prosesnya. Penelitian tentang pilkada Jawa Timur tahun 2018, menemukan bahwa komunikasi politik kiai sudah dilakukan jauh sebelum pilkada dilaksanakan. Kiai mengawal sejak pengkaderan, pencalonan, pemilihan, serta pelaksanaan program (Priambodo, 2019).

Kedua, penelitian yang menemukan keterlibatan kiai dalam struktur politik dengan dampak positif. Ditemukan bahwa interaksi politik kiai Nahdlatul Ulama dalam politik nasional berorientasi pada pragmatisme dan idealisme kesalehan berdasarkan etika Islam (Yani et al., 2022). Aktivitas dakwah dan politik Kiai pada momentum pemilu dapat digabungkan dengan menjadikan politik sebagai wasilah menyampaikan pesan dakwah Islam (Rosi, 2020). Penelitian lain menemukan pola hubungan kiai dan politik terhadap otoritas maupun legitimasi kiai pada lembaga pendidikan dan masyarakat. Peneliti memotret peran sosial kiai dalam membentuk makna-makna baru dari pemahaman keagamaan masyarakat dalam konteks politik lokal (Zainuddin, 2019).

Di antara dampak positif keterlibatan kiai dalam politik, ada tiga: (1) Mayoritas kiai NU Jember memaknai politik sebagai perjuangan untuk mewujudkan kemashlahatan umat serta upaya untuk menjaga aqidah umat dari paham atau

ideologi yang menyimpang. (2) Keterlibatan kiai NU Jember dalam politik praktis dimotivasi oleh orientasi dakwah dan orientasi ideologis. (3) Keterlibatan kiai NU dalam politik praktis (pilpres 2019) menjadi inspirasi politik di kalangan pesantren, alumni, dan simpatisan (Haris & Dardum, 2021).

Ketiga, temuan keterlibatan kiai dengan dampak negatif. Rudy Haryanto (Haryanto, 2010) meneliti kecenderungan kiai menjadi politisi yang diasumsikan masuk ke wilayah rawan korupsi. Hasil penelitiannya menunjukkan kecenderungan kiai yang mengalami distorsi kekiaiannya sehingga sulit menemukan kiai yang cermat dalam bertindak dan memegang teguh agama. Penelitian lain membaca keterlibatan kiai sebagai aktor dalam politik nasional merupakan fenomena pergeseran dan perubahan arah yang awalnya bergerak di jalur kebudayaan menjadi aktor pemberi legitimasi politik. Dalam konteks politik profan dan tendensius, visi, misi, serta advokasi kiai dapat menjadi sempit. Menurutnya, legitimasi kiai seharusnya diperoleh dari sikap, tindakan moral, serta otoritas agamanya, bukan dari kekuasaan dan dukungan politik (Mighfar, 2019).

Penulis berusaha mempertemukan beberapa penelitian sebelumnya dengan memberikan landasan filosofis bagi posisi kiai secara ideal dalam keberhadapannya dengan problem-problem politik yang riil. Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna kiai dalam konteks politik praktis, posisi ideal kiai dalam politik, serta sikap ideal kiai dalam dinamika politik praktis. Penelitian ini menjadi penting untuk meminimalisir hubungan yang terkesan saling mencurigai antara figur kharismatik Islam dan pemerintah yang dalam batas-batas tertentu dapat merusak tatanan harmonis sebuah negara. Sekalipun diasumsikan memiliki wilayah dan kewenangan yang berbeda, kiai dan umara merupakan figur yang dapat menjadi sebuah kekuatan apabila dipersatukan. Penulis melihat bahwa ikhtiar ke arah ini dapat dilakukan antara lain dengan meletakkan tema ini berdasarkan dimensi idealitas dan realitas, kemudian berusaha menemukan titik temu dari keduanya.

METODE PENELITIAN

Tema mengenai kiai dalam politik dibahas dengan menggunakan penelitian kualitatif dan desain studi pustaka. Dengan metode deskriptif, penulis melakukan penelaahan terhadap sejumlah literatur yang relevan, mengungkapkan peristiwa historis yang berkaitan dengan keterlibatan kiai dalam politik, kemudian menganalisisnya untuk menemukan sintesa dari suatu konsep ataupun fakta yang sekilas terlihat kontradiktif.

Data diklasifikasi pada data primer dan data sekunder. Literatur yang merupakan sumber primer terdiri dari karya ilmuwan muslim yang membahas tentang kiai dan kekuasaan politik (Fadhilah, 2011; Haris & Dardum, 2021; Mighfar, 2019; Rosi, 2020; Sadi, 2016; Yani et al., 2022; Zainuddin, 2019), peran kiai dalam politik (Faridl, 2007; Haryanto, 2010; Hasanudin, 2017; Priambodo, 2019). Sementara sumber data sekunder meliputi publikasi ilmiah yang berkaitan dengan konsep ulama (Romzi, 2012), politik (Nambo & Puluhuluwa, 2005), dan politik Islam (Effendy, 2011; Yahya, 2014; Zawawi, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Makna Kiai dalam Politik

Terdapat istilah identik dengan kiai, yaitu ulama. Ulama adalah bentuk plural dari kata Arab *'âlim* yang berarti orang yang berilmu. Secara faktual, kata *'âlim* merujuk pada ulama atau kiai. Karena lebih memfokuskan pada dimensi kultural berdasarkan peran sosiologisnya, penulis lebih memilih istilah kiai daripada ulama yang lebih memerankan fungsi administratif. Perspektif ini ditunjukkan oleh dua faktor yang diperankan kiai. *Pertama*, faktor posisi sosial kiai yang memperlihatkan kekuatan kiai sebagai sumber perubahan bukan saja di lingkungan pesantren tetapi juga di lingkungan masyarakat sekitarnya. *Kedua*, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya (Faridl, 2007).

Menurut Abdul Qadim (Romzi, 2012), kata *kiai* diambil dari bahasa Persia (Irak), yaitu dari kata *kia-kia* yang berarti senang melakukan perjalanan atau diartikan juga orang terpendang. Dengan makna tersebut, kemudian disimpulkan bahwa kiai adalah orang terpendang karena disegani. Sedangkan senang berjalan-jalan diartikan dengan dakwah. Untuk selanjutnya, gelar kiai diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keutamaan spiritual dan kemudian diakui masyarakat. Keutamaan spiritual merujuk pada pengetahuan agama yang luas. Kiai adalah elit religius yang berpengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya sehingga menjadikannya sebagai *key person* (Fadhilah, 2011).

Terdapat beberapa pengertian politik. Secara berturut-turut, berikut adalah politik sebagaimana yang didefinisikan Asad, Abdulgani, Bluntschli, dan Isjwara (Zawawi, 2015).

1. Politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
2. Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin. Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan.
3. Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan.
4. Politik adalah perjuangan kekuasaan

Hakikat politik menunjukkan perilaku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap yang bertujuan memengaruhi atau mempertahankan tatanan masyarakat dengan menggunakan kekuasaan (Nambo & Puluwuluwa, 2005). Politik memiliki interpretasi praktis dan etis. Persoalan penting antara agama dengan politik, dilihat dari segi etika. Praktiknya, yaitu terjemah dari persoalan untuk tujuan apa suatu sistem politik dibangun.

Dalam Islam, politik memiliki sinonim dengan *siyash*. *Siyash* bertujuan untuk menegakkan ajaran agama dan mengatur urusan dunia dalam bingkai kekuasaan politik. Hal demikian karena kehidupan masyarakat memerlukan aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Jika politik dalam pengertian generik sering diasosiasikan pada pemaknaan yang cenderung negatif karena hanya berorientasi pada kekuasaan, ketika dikaitkan dengan Islam, maknanya menjadi sarana

pengabdian kepada Allah, yaitu dengan cara merealisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dengan meminjam kekuatan politik (Widiawati, 2021).

Di satu sisi, tujuan politik dalam Islam adalah menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Politik Islam identik dengan dakwah (Fikri, 2017) yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kebebasan individu, persatuan, persaudaraan, dan kesetaraan (Amril et al., 2023). Di sisi lain, diasumsikan bahwa wewenang kiai adalah pada wilayah keagamaan yang merupakan representasi dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang juga merupakan wilayah kerja pemimpin dalam perspektif Islam. Dalam penalaran ini, pemimpin yang ideal mestilah orang yang paling memahami nilai-nilai kebaikan yang tidak lain adalah kiai. Pada poin inilah pemaknaan kiai dan politik disandingkan.

Idealitas kiai dalam Politik

Peran pembinaan moral umat, terutama dalam konteks pemikiran Islam, merupakan fungsi pemimpin yang mengetahui betul konsep kebaikan. Dalam konteks pemaknaan kiai dalam politik dipahami bahwa secara teori kiai adalah yang paling pantas menduduki jabatan sebagai pemimpin. Pengetahuan pemimpin mengenai agama adalah mutlak supaya kebijakannya senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip universal agama. Agama dalam perilaku memimpin adalah sebagai instrumen utama. Dengan instrumen agama, pemimpin dapat memahami kebutuhan esensial masyarakat yang sesungguhnya.

Pemimpin adalah figur sentral dalam sebuah negara. Dalam konteks keterkaitan definisi politik dan kiai, bahwa pemimpin ideal adalah kiai, ketokohan kiai-pemimpin dapat ditemukan gagasan dasarnya dari pemikiran politik al-Farabi yang menempatkan Nabi sebagai pemimpin yang sempurna dalam sebuah negara utama (*al-madînat al-fadhîlat*). Menurut al-Farabi (Widiawati, 2021), pemimpin harus merupakan orang yang paling unggul baik secara intelektual maupun secara moral. Di samping itu, pemimpin juga harus memiliki kualitas kepribadian yang cerdas, ingatannya baik, pikirannya tajam, cinta pada pengetahuan, moderat dalam hal makanan, minuman dan seks, cinta kejujuran, murah hati, sederhana, cinta pada keadilan, ketegaran dan keberanian, kefasihan berbicara, serta memiliki kekuatan profetik tertentu sehingga senantiasa memperoleh limpahan inspirasi dari sumber sejatinya, Allah swt, melalui perantaraan akal 10.

Dalam bahasa agama, akal 10 merujuk pada Malaikat Jibril yang berperan dalam pelimpahan inspirasi (wahyu atau ilham) terhadap akal *mustafadh* (akal perolehan) manusia yang merupakan refleksi kecerdasan tertinggi akal manusia. Dengan akal ini, manusia dapat berkomunikasi dengan akal 10. Capaian akal perolehan sendiri bukan sesuatu yang *given* atau anugerah tetapi melalui proses kreatif manusia dalam upaya menemukan kebenaran. Dengan teori ini, pemimpin teokratik adalah mungkin sebab kecerdasan teoretiknya sudah mencapai kebenaran ilahiah melalui pelimpahan ilham. Secara teoretik, manusia yang paling mungkin memperoleh inspirasi ini adalah nabi. Dalam konteks pandangan teologis yang memandang kiai sebagai pewaris para Nabi (*waratsât al-anbiyâ*), tampaknya figur yang paling mungkin memperoleh limpahan inspirasi tersebut adalah kiai.

Apabila diterjemahkan dalam konteks kepemimpinan pasca Nabi, terlebih

dalam konteks Indonesia, maka sekali lagi figur pemimpin itu adalah yang mewarisi kebijaksanaan Nabi, yaitu kiai. Dengan ini, kiai yang masuk ke dalam wilayah politik praktis adalah kiai yang memiliki kecakapan teoretis dan praktis tertentu. Secara teoretis kiai tersebut mengetahui prinsip-prinsip kenegaraan dengan pengetahuan yang paling sempurna dari yang lainnya serta secara praktis direalisasikan dalam tindakan serta realisasi yang nyata berdasarkan tuntunan dari kekuatan profetik yang dimilikinya. Dengan demikian, kursi kiai dalam politik juga bukan sesuatu yang *given*. Sebagai pemimpin, kiai harus memiliki dua hal utama, yaitu pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan sebagai dasar tindakan praktik politiknya dan kemampuan untuk merealisasikan segala pengetahuannya dalam kehidupan yang nyata.

Secara normatif, berpolitik merupakan salah satu bentuk realisasi keislaman seseorang. *Pertama*, dari aspek *dakwah bi al-hal*, berpolitik menempati urutan yang penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di era negara bangsa seperti sekarang ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perilaku politik. Dengan ini politik dapat menjadi media bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam menentukan konsep dan perilaku kemasyarakatan ke dalam bentuk kebijakan publik. *Kedua*, dalam konteks *fiqh siyasah*, persoalan “khilafah” mempunyai kedudukan penting sebagai pengganti kenabian yang berfungsi melindungi agama dan mengatur urusan dunia (Yahya, 2014).

Atas dasar itu, kiai sudah selayaknya berperan dalam fungsi penjaga moral bangsa dan pengawal kekuasaan. Kiai hendaknya berperan dalam pengembangan dan pembinaan moralitas bangsa, menjadi rahmat bagi masyarakat yang plural, memperjuangkan prinsip *tasamuh*, *tawazun*, dan *ta’adul* secara luas, untuk menjadi pelaku terciptanya peradaban humanis. Kiai hendaknya merepresentasikan *prototype* pewaris Nabi yang tampil sebagai pelaku aktif perubahan sosial, baik secara konseptual maupun faktual. Ketokohan kiai sebagai panutan masyarakat, menemukan momentumnya ketika ia betul-betul membumikan kehendak masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Perspektif Kiai tentang Politik: Antara Idealitas dan Realitas

Diskusi tentang kiai dalam kekuasaan politik merupakan tema yang menarik. Hal ini disebabkan peran kiai secara umum dipahami berada di wilayah keagamaan. Ketika kiai masuk ke dalam sistem politik formal, kemudian menjadi wacana kontroversial sebab dipandang melampaui wilayah kewenangannya. Kiai kemudian memiliki peran ganda sebab berada di dua wilayah kewenangan, yaitu berperan dalam fungsi pengembangan agama dan terlibat aktif dalam perubahan sosial. Kiai sebagai figur kharismatik yang biasanya menjadi tujuan “silaturahmi” penguasa, pada gilirannya menampilkan diri dalam struktur politik formal.

Masuknya kiai ke dalam struktur politik formal pada dasarnya ditunjang oleh potensialitas ke-kiai-annya sendiri. Dalam masyarakat Islam, kiai merupakan figur elit yang mempunyai kedudukan terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai merupakan salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas tentang agama. Pandangan teologis mengenai kedudukannya sebagai pewaris para Nabi semakin mengukuhkan ketokohnya. Kiai menjadi sumber legitimasi dari berbagai aspek

keagamaan bahkan dari semua aspek kehidupan (Faridl, 2007). Posisi inilah yang menempatkan kiai pada tempat strategis dalam konstelasi politik di Indonesia.

Melihat kedudukan kiai dalam masyarakat sebagai figur kharismatik, posisi ini tidak jarang dijadikan jalan oleh kaum politisi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan cara merangkul kiai ke wilayahnya. Hal ini dapat dipahami, sebab dalam konteks praktik politik di Indonesia, dinamika politik elektoral di negeri ini dan juga beberapa negara di dunia, tidak hanya melibatkan partai politik saja tetapi juga instrumen-instrumen nonkepartaian, seperti ketokohan dan jaringan sosial sebagaimana terjadi pada tahun 1950-an dan era tahun 1980-an. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan instrumen nonkepartaian dalam dinamika politik merupakan faktor yang memiliki nilai politis (Hasanudin, 2017).

Mengikuti paradigma Sansan Hasanudin (Hasanudin, 2017), dalam studinya tentang mekanisme religio-politik pesantren, keterlibatan kiai di dalam politik dapat dianalisis pada tingkat makro, mikro, dan meso. Pada tingkat makro, modal utama kiai dapat memengaruhi dinamika politik karena kiai mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat sebagai figur yang terpercaya. Di tingkat mikro, keterlibatan kiai dalam politik ditandai dengan afiliasinya terhadap partai politik yang bernuansa Islam. Pada tingkat meso, mekanisme keterlibatan kiai didukung oleh keberadaan basis jaringan sosial yang dimilikinya sebagai modal massa dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Hal ini merupakan deskripsi rasional mengenai posisi strategis kiai dalam politik. Ketika seseorang memiliki jaringan politik yang besar, maka dapat dijadikan modal politik ketika ia memasuki wilayah politik praktis.

Sikap kiai sendiri dalam berpolitik berbeda-beda. Ada yang tidak mau terlibat dalam politik praktis karena khawatir menodai integritas kekiaiannya. Namun ada juga yang berpendirian sebaliknya. Sebagian kiai ada yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk masuk ke dalam pusaran politik dengan tujuan untuk melakukan perubahan dari dalam yang senafas dengan substansi *amar ma'ruf nahyi munkar* yang merupakan bidang garapannya. Apabila mencermati argumen yang dikemukakan kedua pendapat tersebut, pada dasarnya semua terlahir dari niat baik, yaitu konsisten dalam penegakkan kebaikan. Yang terakhir merupakan refleksi dari sikap progresif dalam merealisasikan kebaikan, sementara yang pertama dilandasi oleh sikap *wara'*.

Sikap kehati-hatian kiai ketika menolak memasuki wilayah politik formal, dilandasi oleh dua hal. *Pertama*, terdapat tingkat resiko pertanggungjawaban yang sangat tinggi ketika duduk dalam jabatan tertentu. *Kedua*, posisi yudikatif secara khusus memiliki keterkaitan dengan posisi *imamah qubra* (kepemimpinan tertinggi) para khalifah yang satu sama lain memiliki kadar keadilan berbeda. Sejarah menunjukkan sebagian karakter khalifah pasca *al-khulafa' al-rashidun* yang mewarnai praktik politiknya dengan kefasikan (Zawawi, 2015). Atas dasar inilah sebagian kiai memilih sikap berhati-hati ketika harus memasuki wilayah politik formal. Mereka menjaga jarak dengan hegemoni kekuasaan supaya lebih leluasa membangun nilai yang akan ditanamkan dalam kehidupan sosial.

Hal ini dapat dimengerti, terlebih jika dihadapkan pada suhu politik yang sudah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakatnya. Kerja pemimpin tidak lagi dilandasi oleh keberpihakan pada kebenaran dan kemaslahatan tetapi didasarkan pada politik kepentingan elit politik tertentu. Sejarah memperlihatkan bahwa hal yang

menghalangi realisasi sebuah negara yang menjamin kesejahteraan serta kebahagiaan bagi para warganya bukan hanya karena faktor konseptualisasi teori kebangsaan yang cacat tetapi juga karena fokus penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan sudah menyimpang dari tujuan ideal. Konsistensi penguasa pada realisasi tujuan awal tidak lain merupakan ciri pemimpin yang mencintai kebenaran yang merupakan representasi pemimpin ideal.

Pada kondisi negara yang memiliki cacat pada keduanya, yaitu cacat administratif dan krisis ketokohan pemimpin, maka tampilnya kiai ke dalam struktur politik formal seharusnya menjadi figur penyelamat bangsa dengan memberi masukan kepada penguasa supaya selaras dengan tujuan awalnya. Jika eksistensi negara sedang benar-benar dalam keadaan sakit, dan kehadiran kiai tidak memberi dampak apapun, bukan tidak mustahil kiai justru terjerumus ke dalam arus politik yang mengalami krisis tersebut. Sehingga, apa yang dikhawatirkan tentang distorsi fungsi kiai (Haryanto, 2010) dan sempitnya ruang gerak kiai (Mighfar, 2019) mungkin dapat terjadi. Lagi-lagi, ini menjadi pertimbangan sebagian kiai untuk berhati-hati dengan cara menjauhi politik praktis.

Kedudukan strategis kiai seringkali dimanfaatkan oleh politisi untuk memperkuat basis legitimasinya. Menyikapi terjadinya politisasi kiai yang berimplikasi pada menurunnya ketokohan kiai, jika kiai tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan arus politik, ada baiknya kiai memutar haluan kembali kepada umat untuk menjadi penjaga moral dan etika bagi mereka. Jika godaan kekuasaan membuat kiai sulit menjaga komitmennya, sehingga menempatkannya ke wilayah lokal dan semakin meminggirkannya dari umat, sebaiknya kiai meredefinisi makna politik itu sendiri.

Lagipula, dalam kapasitas kemanusiaannya, kiai juga berada dalam posisi yang mungkin melakukan kesalahan. Dalam konteks ini dibedakan antara kiai politik dan politik kiai. Seorang kiai politik dapat menjalankan misi politik kiai dan sebaliknya dapat pula lepas sama sekali dari politik kiai. Misi ke-kiai-annya hilang karena karena ada kepentingan lain yang lebih menguntungkan, biasanya secara material. Pada sisi ini, memosisikan kiai sebagai penjaga dan pengawal moral bangsa tampaknya terlalu naif (Yahya, 2014). Sementara politik kiai dalam konteks ini bukan dalam pengertian partisan yang berebut kursi dan kekuasaan yang seringkali menimbulkan konflik. Politik kiai adalah politik kebangsaan, politik bagaimana mengarifi kehidupan yang plural yang dibangun di atas prinsip *tasamuh*, *tawazun*, dan *ta'adul*. Dengan ini, maknanya bukan tentang siapa menguasai siapa dan siapa menguasai apa, tetapi refleksi politik yang santun terhadap pluralitas.

Berkaitan dengan pembagian karakter konseptual kiai, ditemukan kiai yang lebih lentur dan sangat mudah berubah, sehingga politik terkesan menjadi sebuah permainan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang senantiasa berubah dan berkembang. Di pihak lain terdapat kiai yang terkesan kaku dengan memilih konsisten pada pendirian awalnya yang menempatkan politik dalam kerangka prinsip (Faridl, 2007). Pada yang pertama, kiai yang berjuang di jalur politik terjebak pada persoalan pragmatis, kapasitasnya turun secara drastis hanya sebagai perpanjangan lidah atau pembenar kebijakan pemerintah.

Namun demikian, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat

sebagian kiai yang menerima dan bahkan mengupayakan untuk menduduki jabatan-jabatan penting tertentu karena mereka melihat posisi yang lebih baik untuk memperbaiki sistem dari dalam serta semakin mudah dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi kemaslahatan bagi kemanusiaan. Mencermati situasi politik yang seolah-olah berpihak pada realisasi kehidupan sekuler, kiai melihat ini sebagai bagian dari persoalan yang harus diperjuangkan dengan menjadikan politik praktis sebagai pintu masuk.

Dimensi idealitas masuknya kiai ke dalam sistem politik berorientasi pada tujuan mulia. Kiai dapat menjadi pelaku yang membersihkan praktik politik yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Melalui integritas peran dan fungsinya sebagai pewaris para nabi, kiai hendaknya menjadi pengawal bagi terselenggaranya praktik politik yang baik dan maslahat. Kiai juga dapat menjadi figur yang berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik kepentingan. Sebagai sosok kharismatik, kiai adalah teladan dan basis ketaatan umat. Di tengah citra politik yang tidak jarang merosot, kiai masuk dan ikut memperbaiki kerusakan dari dalam. Terlebih dengan citra negatif para elit politik yang jauh dari implementasi *amar ma'ruf nahi munkar*, kiai diharapkan dapat berperan dalam implementasi tersebut.

KESIMPULAN

Peran kiai linier tujuan politik dalam Islam, yaitu merealisasikan kebaikan dalam kehidupan yang merupakan representasi *amar ma'ruf nahi munkar*. Liniaritas tersebut memosisikan kiai sebagai sandingan politik sebab pemimpin ideal mestilah orang yang paling memahami nilai-nilai kebaikan yang merupakan wilayah formal kiai. Masuknya kiai ke dalam ranah politik dikawal oleh tujuan mulia, antara lain memastikan politik benar-benar bersih dari segala praktik yang menyimpang.

Ketika kiai masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, maka kiai menjadi perpanjangan tangan kekuasaan selama kebijakan penguasa tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Jika arus kekuasaan sudah mulai ke luar jalur idealitas kenegaraan dan kebangsaan, tampilnya kiai adalah sebagai pengawal bagi penguasa supaya konsisten dengan komitmen semula dalam rangka mewujudkan peradaban humanis.

Ketika Kiai masuk ke dalam pusaran politik, maka dikembalikan kepada kiai yang bersangkutan. Jika perannya di dunia politik tidak lebih sekedar alat kekuasaan yang tidak lagi berpihak pada umat, sebaiknya kiai melepaskan tujuan-tujuan pragmatis yang merupakan kecelakaan politik praktis. Apakah dalam politik yang syarat dengan intrik dan konflik, kiai politisi itu mampu meminimalisir konflik dan berperan sebagai pemecah masalah. Jika tidak, maka kedudukan agama dapat turun menjadi instrumen kekuasaan. Kiai-politisi harus mampu merealisasikan peran sosiologisnya secara tulus dan konsisten. Hal demikian karena politik bagi kiai bukan sekedar alat kekuasaan tetapi ilmu tentang bagaimana membangun kemaslahatan universal. Dalam lingkaran politik praktis, kiai-politisi ibarat seorang joki yang harus mampu mengarahkan dan mengendalikan kuda. Ia harus fokus pada tujuan dan tidak menyerahkan pada kehendak kuda-kuda kekuasaan supaya tidak tersesat ke jalan yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. *Clavia*, 20(2), 195–205. <https://doi.org/10.56326/clavia.v20i2.1652>
- Amril, A., Putri, E. W., & Andrea, D. (2023). Integrasi Islam dan Politik dalam Perspektif Hamka. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(1), 74. <https://doi.org/10.22373/substantia.v25i1.17097>
- Effendy, B. (2011). *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Democracy Project.
- Fadhilah, A. (2011). Kiai & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(1).
- Faridl, M. (2007). Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia Dr. Miftah Faridl. *Jurnal Sosioteknologi*, 11 Tahun 6, 195–202.
- Fikri, Z. (2017). Politik Islam antara Dakwah dan Orientasi Kekuasaan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 13(26), 55–60.
- Haris, A., & Dardum, A. (2021). Kiai Nu Dan Politik (Keterlibatan Kiai Nu Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019). *Fenomena*, 20(1), 91–114. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51>
- Haryanto, R. (2010). Korupsi di Pesantren; Distorsi Peran Kiai dalam Politik. *Karsa*, XVII(1), 38–50.
- Hasanudin, S. (2017). Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i1.6797>
- Mighfar, S. (2019). Ambiguitas Politik Ulama-Kiai. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(1), 37–50. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.448>
- Mulya Mantri, Y. (2022). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(3), 123–138. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/index©Mantrihttp://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Priambodo, B. (2019). Komunikasi Politik Kiai Dalam Pencalonan Gus Ipul Puti Pada Pilkada Jawa Timur Tahun 2018. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6353>
- Romzi, M. (2012). Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama. *RELIGIÓ: Jurnal Studi Agama-Agama (UIN Sunan Ampel Surabaya)*, 2(1), 42.
- Rosi, F. (2020). Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 7(2), 233–255. <https://doi.org/10.52491/at.v7i2.34>
- Sadi, H. (2016). Kiai Dan Politik: Mengintip Motif Kiai Nu (Nahdlatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Khazanah Pendidikan*, X(1).
- Wahidin, W., & Arisman, A. (2021). *Sosiohistoris Islam Asia Tenggara*. Kalimedia.
- Widiawati, N. (2021). *Filsafat Islam* (1st ed.). Pustaka Ellios.

- Yahya, H. I. (2014). Demokrasi Pesantren : Menebar Format Politik Yang Damai. *Jurnal At-Taqaddum*, 6(2), 187-205. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/713>
- Yani, M. T., Mahfud, C., Rangga Sa'adillah, S. A. P., Bustami, M. R., Maskuri, & Taufiq, A. (2022). Advancing the discourse of Muslim politics in Indonesia: A study on political orientation of Kiai as religious elites in Nahdlatul Ulama. *Heliyon*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12218>
- Wahyu Nurhayati, D. A., & Oktavia, N. T. (2023). Sejarah Perjuangan Gus Miek dalam Menggagas Dzikrul Ghofilin. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(2), 58-63. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i2.45>
- Zainuddin, Z. (2019). Kiai dan Politik: Implikasi dan Masa Depan Lembaga Pendidikan Islam di Sumatera Selatan. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 4(3).
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 85-100. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>